

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Surat perintah 11 Maret 1966 atau dikenal dengan istilah Supersemar, merupakan titik awal kelahiran Orde Baru yang isinya Presiden memerintahkan kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggapnya perlu demi menjamin keamanan, ketenangan, stabilitas pemerintahan dan revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi serta kewibawaan Presiden, Panglima tertinggi pemimpin besar revolusi. Selanjutnya Soeharto juga diperintahkan untuk melaporkan segala hal sehubungan dengan pelaksanaan dan tugas-tugas tersebut kepada Presiden Soekarno.¹

Soeharto tidak membuang-buang waktu menggunakan kekuasaan yang baru diterimanya. Pada 12 Maret 1965, ia mengeluarkan perintah harian yang ditunjukkan kepada seluruh jajaran angkatan bersenjata dan rakyat Indonesia. Pada hari yang sama ia mengeluarkan perintah yang pertama sebagai pemegang surat perintah 11 Maret 1965. Atas nama Presiden ia memerintahkan pembubaran PKI dengan segala organisasi mantelnya di seluruh tanah air, sambil tetap harus berpegang teguh kepada Panca Azimat Revolusi Indonesia. Dengan amat secara pribadi kepada Soekarno, Soeharto melakukan apa yang diinginkan oleh Angkatan darat, yang sejak oktober 1965 selalu di tolak. Harloch mengatakan, tindakan Soeharto telah menjebak para pendukung Presiden Soekarno dalam keadaan tak berdaya untuk

¹ Kasenda Peter, *Soeharto, bagaimana ia bisa melanggengkan kekuasaan selama 32 tahun*?, (Jakarta, Kompas 2013) h 35

membelanya. Tetapi, sekali Presiden telah membubuhkan tandatangannya, mereka tak kuasa untuk menolak perintah Soeharto untuk membubarkan PKI yang menempatkan para pendukung Presiden dikalangan militer dalam keadaan serba canggung.²

Dalam keabsahan munculnya Orde Baru pertama dipungsi. Pemimpin TNI mengklaim sebagai pembela nasionalis Indonesia, lebih dekat dengan rakyat, sejak kemerdekaan, mereka terpanggil membela kepentingan rakyat dari Kaum Kanan (Islam politik), dan Kaum Kiri (Komunis). Kedua turunya Supersemar pada 1966 yang memberi wewenang kepada Jendral Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan menjaga keamanan dan ketertiban. Ketiga lebih khusus lagi status konstitusional MPR sebagai wujud kedaulatan rakyat dan membersihkan unsur-unsur kiri dan yang berpihak pada Soekarno di lembaga. Keadaan situasi seperti yang dijelaskan di atas Presiden Soekarno dalam kesimpulannya tidak mampu untuk menunaikan tugas-tugasnya menjadi Presiden yang berdasarkan UUD maupun ketetapan MPRS. Akhirnya pada 1967 ia mengangkat dirinya sebagai pejabat Presiden.

Salah satunya politik yang dilakukan terhadap Islam. Pada masa pemerintahan sepuluh tahun pertama Presiden Soeharto bisa dikatakan bersikap membatasi dan menindas terhadap aspirasi umat Islam. Kebijakan Soeharto dalam menciptakan kestabilan NKRI pada masa Orde Baru harus mengorbankan demokrasi dan hak-hak masyarakatnya, termasuk organisasi politik dan organisasi Islam. Organisasi

² Kasenda Peter, *Soeharto, bagaimana ia bisa melanggengkan kekuasaan selama 32 tahun*?, (Jakarta, Kompas 2013) h 37

politik dan organisasi Islam harus mengalami keterbatasan dalam melakukan pengembangan, setelah pemilihan umum tahun 1971 pemerintah Orde Baru selanjutnya menawarkan penyederhanaan Partai Politik sehingga hanya terdapat 3 partai Politik yang ada di Indonesia, hal ini dapat dilihat dengan adanya meleburkan atau menfusi terhadap beberapa partai politik pada tahun 1973 yakni:

1. Kelompok nasionalis (PNI, IPKI, Murba)
2. Kelompok spiritual (NU, PMI (Parmusi), PSI, Perti, Parkindo dan Katholik. Belakangan karena Parkindo dan Katholik berbeda agama, maka berafiliasi dengan nasionalis.
3. Golongan Karya, Korps Pegawai Republik Indonesia, dan purnawirawan dan pensiunan tentara.³

Semua kebijakan yang membatasi dan menyudutkan Islam membuat umat Islam bersifat opositif terhadap pemerintah, bahkan pada dasawarsa ini fatwa-fatwa ulama mewajibkan umat Islam memilih partai Islam dalam pemilu. Dakwah-dakwah yang disampaikan dari tokoh agama Islam juga sering berisi kritik-kritik terhadap pemerintah. Menanggapi hal tersebut pemerintah melakukan pembatasan aktivitas dakwah Islam, termasuk keharusan adanya surat izin dari aparat keamanan setempat bagi da'i sebelum penyampaian dakwah, sehingga muncul ketegangan diantara umat Islam dengan pemerintah kurang lancar. Akibatnya pemerintah

³ Azra Azyumardi, Umam Syaifur (ed), *Mentri-mentri agama dan RI Biografi dan Politik*, (Jakarta: ppim, 1998), h 328

kesulitan melakukan komunikasi dengan umat Islam, karena tidak ada organisasi Islam yang supportif terhadap pemerintah.

Kebijakan yang disebut ofensif ideologi ini telah mengundang perdebatan yang serius dan sengit dikalangan parpol, dan tentu ormas-ormas Islam. Orde Baru tampak tidak mau mengambil resiko ditengah situasi politik dan ekonomi yang belum stabil saat itu. Partai politik tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Melamahnya partai politik ini sengaja diciptakan sebagai salah satu usaha pemerintah Orde Baru untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan dukungan yang terpusat pada penguasa. Soeharto mempunyai anggapan bahwa partai politik, seperti yang pernah terjadi pada masa demokrasi liberal, merupakan sumber konflik dan ketidak stabilan politik. Hal ini yang mendorong untuk melakukan tindakan “pengebirian partai-partai politik” tersebut.⁴

Penyusutan partai ini hanyalah sasaran bagi Soeharto, kemudian digunakan untuk mencapai sebuah sasaran yang lebih tinggi, yaitu kemenangan “demokratis” melalui pemilu. Sebagai pemimpin pemerintahan di negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis, kemenangan melalui pemilihan umum adalah sebuah legitimasi yang tak tergoyahkan dan untuk memenangkannya, maka berarti pemerintah memerlukan sebuah partai untuk dijadikan kendaraan pacu dalam pemilu.⁵

Lagi-lagi, ini telah menjadi tugas Ali Moertopo dengan Opsus, awalnya ia kurang tertarik untuk menjadikan Sekber Golkar (Sekertariat Bersama Golongan

⁴ Wardaya T. Baskara, *Menguak misteri kekuasaan Soeharto*, (Yogyakarta, Galang Press, 2008) h 132

⁵ Yogaswara A. *Biografi Daripada Soeharto*, (Yogyakarta, Media Presindo, 2007) h 188

Karya) sebagai perwalian pemerintah dalam parlemen. Ali menganggap bahwa konsep serta kecenderungan Golkar yang Soekranois tidak sesuai dengan cita-cita pemerintah. Namun bagi Presiden Soeharto, Golkar sangat berpotensi untuk dijadikan wahana. Baginya, Golkar adalah partai yang istimewa karena dalam partai ini tidak ada tokoh-tokoh politisi yang menonjol.⁶

Maka dimulailah aksi gerilya Ali Moertopo dengan di bantu oleh Sudjono Humardani untuk membesarkan Golkar. Para pegawai negeri “dianjurkan” untuk memilih Golkar pemilihan dilakukan di kantor mereka sendiri sehingga mereka yang tidak mencoblos Golkar memiliki resiko ketahuan. Pendekatan kepada organisasi-organisasi muslim juga dilakukan dengan di iming-imingi dan dijanjikan dana naik haji serta pembangunan masjid bila mereka bersedia mengajak anggotanya untuk gabung dan memilih pada Golkar. Para pejabat daerah dinilai kinerjanya berdasarkan perolehan suara bagi Golkar.⁷

Sementara itu upaya pengeroposan parati-partai lain terus dijalankan. Orang-orang PNI ditarik kedalam keanggotaan Golkar. Guntur Soekarno putra, putra tertua Presiden ke satu , dilarang mencalonkan diri melalui PNI. Kopkamtib turut diberdayakan dengan melarang calon-calon tertentu mengikuti pemilu dengan alasan “keamanan”. Upaya ini di dukung dengan mencari sokongan pemberitaan media masa. PWI resmi pimpinan Rosihan Anwar kemudian harus berhadapan dengan PWI pimpinan B.M Diah yang didukung oleh pemerintah.⁸

⁶ Yogaswara A. *Biografi Daripada Soeharto*, (Yogyakarta, Media Presindo, 2007) h 188

⁷ Yogaswara A. *Biografi Daripada Soehrto*, (Yogyakarta, Media Presindo, 2007) h 189

⁸ Yogaswara A. *Biografi Daripada Soehrto*, (Yogyakarta, Media Presindo, 2007) h 189

Dengan segala trik dan daya upaya Ali Moertopo, dalam waktu yang relatif singkat terjadi perubahan kekuatan politik yang cukup signifikan. Meski demikian, hasil pemilu pada 1971 yang berakhir bagi kemenangan Golkar sebanyak 62,8 % bagi para peneliti politik sangat mengherankan. Pada tahun-tahun berikutnya, melalui cara yang sama Orde Baru memperoleh suara yang mereka nyaris tak tersentuh oleh pesaingnya. Pada 1973, dalam rangka memudahkan kemenangan Golkar dalam setiap pemilu maka sembilan partai kontes tanpa pemilu 1971 di leburkan menjadi dua partai, yaitu PPP yang dikatakan perwakilan unsur “spritual” dan PDI mewakili unsur “nasionalis”. Golkar sendiri dengan segala hak istimewanya mengklaim sebagai perwakilan dari “fungsional” dengan demikian, Orde Baru semakin kokoh mentancapkan kuku kekuasaannya di alam politik Indonesia.⁹

Setelah kebijakan penyederhanaan partai. Soeharto juga menerapkan asas tunggal Pancasila, kebijakan asas tunggal oleh Orde Baru di desain melalui pendekatan legalistik yang berawal dari ketetapan MPR RI No 11/ 1983 yang secara operasional di tuangkan dalam Undang-undang Nomor 3 dan no 1985. Dengan adanya keputusan ini baik organisasi maupun partai politik, semua harus merubah asas yang sebagian besar Islam menjadi Pancasila.¹⁰

Selain itu Soeharto kelihatanya lebih tegas dalam memperlihatkan kekhawatirannya terhadap “politik Islam”. Soeharto menganggap bahwa upaya Islam untuk menjadikan Indonesia negara yang ber asas pada agama ini, seperti di

⁹ Yogaswara A. *Biografi Daripada Soeharto*, (Yogyakarta, Media Presindo, 2007) h 189

¹⁰ Hisyam Muhammad (Peny), *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*, (Jakarta: yayasan obor Indonesia, 2003), h 344

perlihatkan pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indoensia (BPUPKI) menjelang kemerdekaan dan dalam Majelis Konstituante dan gerakan DI merupakan target permanen perjuangan mereka.¹¹Karena itu bagi Soeharto isu ini sudah cukup untuk curiga terus menerus dan bertindak tegas terhadap politik Islam, apalagi terhadap politik Islam “garis keras”.

Kecurigaan diatas selain karena Soeharto lebih banyak terpengaruh ajaran sinkertisme Jawa, karenanya tidak mempunyai ikatan emosional dengan Islam santri yang memperjuangkan politik Islam dan mayoritas pendukung Soeharto dari jajaran angkatan darat dan abangan.

Dengan ditolaknya permintaan merahabilitasi partai Masyumi di awal pemerintahan orde baru, karena para pemimpnnya telah mengkhianati dua dari sila-sila yang paling funda mental dari identitas: multi keagamaan dan persatuan nasional, maka pemerintahan orde baru teah menciptakan image bahwa politik Islam bukan saja bertentangan dengan kesepakatan bersama yang telah digagas para “founding father” negara ini melainkan juga akan membawa bangsa ini ke dalam perpecahan.¹²Orde baru memberikan pencitraan bahwa keberhasilan politik Islam akan menciptakan situasi dimana tidak tersedia tempat bagi pemeluk agama lain. Karena itu, bagi Orde Baru uapaya-upaya yang menjalankan politik Islam adalah bagian dari fundamentalisme yang bisa membahayakan negara.

Dalam kamus Orde Baru politik Islam disebut sebagai ekstrem kanan, sementara gerakan kiri disebut Komunis. Dua konsep itu sering dijadikan alasan

¹¹Hisyam Muhammad (peny), *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*, (Jakarta: yayasan obor Indonesia, 2003), h 359

¹² Hisyam Muhammad (peny), *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*, (Jakarta: yayasan obor Indonesia, 2003), h 358

bagi tentara untuk mengalamatkan tuduhan dan menggusur setiap gerakan politik yang berbau dua ekstrem tersebut. Kekhawatiran tersebut kemudian ditegaskan dengan dibuatnya aturan-aturan yang secara tidak langsung menyudutkan atau merugikan kelompok Islam. Dengan dalih untuk menjaga ke stabilitas dan karena ke khawatiran di atas, pemerintah Orde Baru telah melakukan tekanan-tekanan terhadap partai politik.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian di atas penulis akan merumuskan beberapa masalah yaitu :

1. Bagaimana kondisi politik Indonesia pada masa awal Orde Baru ?
2. Apa saja kebijakan Orde Baru terhadap politik Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan diatas penulis bertujuan :

1. Mengetahui kondisi politik Indonesia pada masa awal Orde Baru
2. Mengetahui kebijakan Orde Baru terhadap politik Islam

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka penulis menemukan buku mengenai politik pada masa Orde Baru dari langkah-langkah Politik Orde baru dan kebijakan politik Orde Baru antara lain :

1. Presiden Soeharto, Amanat Kenegaraan Jilid II 1972-1976, di caetak di Jakart serta di cetak oleh penerbit Inti Ida Ayu Press tahun 1985. Dalam buku ini semua kumpulan teks pidato kenegaraan Presiden Soeharto dari tahun 1972-1976

2. Presiden Soeharto, Amanat Kenegaraan Jilid IV 1982-1985, di caetak di Jakart serta di cetak oleh penerbit Inti Ida Ayu Press tahun1985. Dalam buku ini semua kumpulan teks pidato kenegaraan Presiden Soeharto dari tahun 1982-1985
3. Soeharto, Pikiram, Ucapan dan Tindakan saya, Otobiografi, seperti yang dipaparkan kepada Ramadan KH dan G Dwipayana di cetak di Jakartadan di terbitkan oleh PT Citra lamtoro gung persada pada tahun 1989.
4. Ali Moertopo, dengan judul buku Strategi pembangunan nasional di cetak di Jakarta di terbitkan oleh csis pada tahun 1981. Buku ini membahas mengenai strategi arah pembangunan Orde Baru dan Ali Moertopo ialah salahsatu dari penggerak dari pembangunan tersebut.
5. Dokumen negara mengenai Undang-Undang partai politik dan Golkar No 3 tahun 1975 dan Undang-Undang tentang Ormas No.3 tahun 1985. Di peroleh dari lembaga Arsip Nasional yang terletak di Jakarta.

Dalam skripsi ini penulis akan menguraikan beberapa kebijakan politik Orde Baru terhadap kegiatan politik Islam. Di karenakan yang penulis tau belum ada yang menulis tentang Presiden Soeharto dari segi kebijakan politik terhadap kegiatan politik Islam.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam penelitian penulisan skiripsi, penulis menggunakan metode historis yang merupakan netode penelitian sejarah yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu

heuristik, kritik, intepretasi dan historiografi. Adapun beberapa tahap tersebut digunakan sebagai berikut:

1. Heuristik

Tahapan dalam penelitian sejarah yaitu pencarian sumber, menghimpun sumber, menemukan informasi, jejak masa lampau.¹³ Jenis sumber sejarah terdiri dari sumber lisan, sumber tulis dan benda. Sumber tulis yaitu sumber yang didapat secara lisan atau wawancara oleh orang-orang saksi sejarah dan warisan tradisi lisan. Sumber tertulis berupa hasil tulisan yang di masukan ke media kertas seperti buku, dokumen surat dan sebagai nya. Sumber benda ini biasa nya peninggalan reruntuhan seperi arca batu nisan dan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu arkeologi.¹⁴

Sejalan dengan teknik penulis pertama akan menacari sumber dari literatur yaitu pencarian sumber dengan sumber tulisan buku-buku, media cetak, foto dan dokumen. Dalam penelusuran sumber penulis mengunjungi beberapa tempat keberbagai perpustakaan, arsip, toko buku dan teman, sodara dan sahabat yang mempunyai banyak buku di setiap kos dan rumahnya.

Penulis banyak mendapat sumber buku dan dokumen salah satunya ialah:

¹³Nina herina, *Metodologi Sejarah*, (Bandung: Satya Historika, 2011), h 17

¹⁴ Helius Sjamsudin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2007), h 102

- a. Presiden Soeharto, Amanat Kenegaraan Jilid II 1972-1976, di caetak di Jakart serta di cetak oleh penerbit Inti Ida Ayu Press tahun1985. Dalam buku ini semua kumpulan teks pidato kenegaraan Presiden Soeharto dari tahun 1972-1976
- b. Presiden Soeharto, Amanat Kenegaraan Jilid IV 1982-1985, di caetak di Jakart serta di cetak oleh penerbit Inti Ida Ayu Press tahun1985. Dalam buku ini semua kumpulan teks pidato kenegaraan Presiden Soeharto dari tahun 1982-1985
- c. Soeharto, Pikiram, Ucapan dan Tindakan saya, Otobiografi, seperti yang dipaparkan kepada Ramadan KH dan G Dwipayana di cetak di Jakartadan di terbitkan oleh PT Citra lamtoro gung persada pada tahun 1989.
- d. Ali Moertopo, dengan judul buku Strategi pembangunan nasional di cetak di Jakarta di terbitkan oleh csis pada tahun 1981. Buku ini membahas mengenai strategi arah pembangunan Orde Baru dan Ali Moertopo ialah salahsatu dari penggerak dari pembangunan tersebut.
- e. Dokumen negara mengenai Undang-Undang partai politik dan Golkar No 3 tahun 1975 dan Undang-Undang tentang Ormas No.3 tahun 1985. Di peroleh dari lembaga Arsip Nasional yang terletak di Jakarta.

2. Kritik

Berbicara mengenai kritik ini adalah tahapan kedua dari metode penelitian sejarah, yaitu proses verifikasi sumber yang telah di dapat untuk memperoleh otentitas dan kredibilitas dari sumber yang didapat. Adapun tahapan kritik terbagi menjadi dua bagian, yaitu kritik eksternal yang berkaitan dengan keaslian sumber dan kritik internal yang berkaitan dengan kredibilitas sumber.¹⁵

a. Kritik Ekstern

Metode kritik eksternal dilakukan untuk menentukan otentitas sumber yang telah di dapat, yaitu otentik atau tidaknya, asli atau palsu sumber tersebut. Penulis melakukan pengujian atas asli atau tidaknya sumber tersebut dengan menyelidiki segi-segi fisik dari sumber yang diketemukan. Disini penulis menggunakan sumber tertulis, maka harus diteliti mengenai kertas, tinta, gaya tulisan, kalimat, bahasa, ungkapan, huruf, kata-kata dan segi penampilan yang lain itu minimal diuji berdasarkan lima pertanyaan pokok, yaitu: Kapan sumber dibuat ?, dimana sumber dibuat?, siapa yang membuat?, dari bahan apa sumber itu dibuat?, apakah sumber itu dalam bentuk asli?¹⁶

Terkait dengan skripsi yang penulis melakukan kritik ekstern sumber-sumber didapat berupa buku-buku yang telah diterbitkan kebanyakan merupakan karya hasil dari tokoh objek dan lembaga negara seperti kumpulan pidato dan wawancara dari Presiden Soeharto,

¹⁵ Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta Logos, 1999), h 59-61

¹⁶Dudung Abdurahman, *Metode Sejarah*,(jakarta Logos , 1999) h. 59-60

sejarawan dan orang terdekat presiden Soeharto, serta dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh sekretariat negara sehingga sesuai dengan keilmuan dan keobjektifitasan, utamanya yang digunakan menyangkut dengan kajian konseptual maupun kajian analisis bukunya.

Adapun hasil dari tahapan kritik ekstren terhadap sumber yang didapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Terhadap sumber berupa arsip dokumen, kritik ekstren yang dilakukan, yaitu dengan mengecek keadaan arsip tersebut. Kebanyakan yang di dapat masih dalam kondisi baik. Mengenai tanggal dibuatnya arsip, sesuai dengan periode yang dikaji yang artinya sezaman dengan arsip adalah langsung dari lembaga kesekretariatan negara.
- 2) Terhadap sumber buku, yang dijadikan dalam sumber penelitian skripsi ini dipilih sesuai dengan tema dan judul buku yang dikaji. Kebanyakan buku yang di dapat adalah buku kumpulan teks pidato dan wawancara langsung, buku karya sejarawan, dokumen-dokumen negara dan didapatkan dengan kondisi baik. Beberapa dokumen sumber terbitan dari sekretariat negara maupun penerbit lain. Mengenai tanggal diterbitkannya buku yang dijadikan sumber penelitian ada beberapa cetakan pertama adapula cetakan ulang pada tahun berikutnya. Sebagiaian besar

tahun diterbitkannya buku dan dokumen tersebut masih sezaman tahun yang dikaji.

b. Kritik Intren

Tahap selanjutnya kritik internal dilakukan untuk menentukan kredibilitas sumber dalam penulisan skripsi ini, yaitu dengan cara dan langkah-langkah sebagai berikut: *pertama*, meneliti dari sifat yang digunakan, apakah bersifat resmi atau tidak? *Kedua*, meneliti sumber dari aspek mental penulisannya dan apakah penulis sumber tersebut mau atau tidak dalam menyampaikan informasi yang dimilikinya? *Ketiga*, membandingkan dengan sumber yang lain. *Keempat* melakukan korbokasi atau saling mendukung antar sumber yang tersedia.¹⁷

Dengan melakukan kritik tersebut, dapat ditentukan shahih tidanya bukti atau fakta sejarah dari sumber yang didapatkan. Dari hasil peneliiian dan penyelesaian sumber, didapatkan bahwa sumber bisa dikategorikan ke dalam sumber resmi. Hal ini didasarkan pada tempat dan asal sumber tersebut. Mengenai aspek mental dapat diketahui bahwa sumber-sumber tersebut ditulis oleh lembaga resmi sekertariat negara, yayasan penerbit yang membantu pemerintah dalam penerbitan beberapa buku dan penulis yang memang paham betul mengenai kajian politik Orde Baru serta aspek-aspek yang berkaitan dengan kajian tersebut. Setelah membandingkan dan melakukan korbokasi antara

¹⁷ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta: ,1973), hlm. 114.

sumber dengan yang lain didapatkan bahwa adanya saling mendukung antara sumber-sumber tersebut.

Adapun hasil dari tahapan kritik intren terhadap sumber yang didapatkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Terhadap sumber arsip atau dokumen, kritik intren dilakukan dengan menentukan sumber yang kredibel dan relevan terhadap penelitian yang dilakukan. Arsip yang diperoleh resmi karena di dapat dari lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia. Di samping itu arsip tersebut di berikan dari kesekretariatan negara kepada lembaga arsip nasional.
- 2) Terhadap sumber buku, sumber yang didapat berupa buku yang di tulis oleh beberapa tokoh utama dalam kajian ini dan para sejarawan yang mengkaji politik Orde Baru. Salah satu buku yang dijadikan ialah sumber ialah beberapa kumpulan teks pidato kenegaraan Presiden Soeharto dan otobiografi tokoh yang dikaji, dalam peneltian ini sehingga menguatkan bobot sumber yang digunakan.

3. Interpretasi

Tahapan selanjutnya yaitu interpretasi atau penafsiran, suatu proses penafsiran sejarah dari sumber-sumber yang telah diverifikasi.¹⁸ Penafsiran ini dapat berupa analisis atau menguraikan maupu sintesis atau menyatukan. Fakta-fakta yang didapat dari hasil kritik intren ini penulis intrepretasikan

¹⁸ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta 2005), h. 102.

sehingga dalam memahami permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian skripsi ini dapat di tarik garis depannya.

Bedasarkan dari beberapa fakta yang telah diperoleh bahwa interpretasi atau penafsiran sejarah disebut juga analisis sejarah. Analisis ini berarti menguraikan secara terminologis objek kajian yang sedang diteliti. Maka teori yang dapat digunakan untuk menganalisis terkait dengan judul penelitian yang sesuai dan dapat menggunakan teori Inkremental, teori ini mencerminkan suatu teori pengambilan keputusan yang menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan, dalam pokok-pokok teori inkremental ini pembuatan keputusan yang dihadapi oleh pembuat keputusan akan diredifinisikan secara teratur. Pandangan inkrementalisme memberikan kemungkinan untuk mempertimbangkan dan menyesuaikan tujuan dan sarana sehingga menjdikan dampak dari masalah itu dapat lebih ditanggulangi.¹⁹

Menurut linblom paham inkremental merupakan ciri khas proses pembuatan keputusan dalam masyarakat majemuk. Keputusan-keputusan dan kebijakn-kebijakan pada hakikatnya merupakan produk dari saling memberi, menerima dan percaya diantara berbagai pihak yang terlibat dalam proses keputusan tersebut. Dalam masyarakat, paham inkremental ini secara politis lebih aman. Karena akan lebih gampang unuk mencapai kesepakatan apabila masalah-masalah yang diperdebatkan oleh berbagai kelompok yang terlibat hanya bersifat upaya memodifikasi terhadap

¹⁹ Solihi Abdul Wahab, M.A, *Analisis Kebijakan*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2012) h 79

program yang sudah ada. Pada dasarnya, seseorang bersifat pragmatis, yakni tidak selalu berusaha menemukan satu-satunya cara yang terbaik untuk mengatasi permasalahan melainkan selalu berusaha menemukan cara pemecahan masalah yang dapat dilaksanakan.²⁰

4. Historiografi

Historiografi merupakan hasil akhir dari sebuah metode penelitian sejarah dengan telah melewati beberapa tahap yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan terahir historiografi. Pada tahap historiografi penulis akan memaparkan fakta-fakta sumber yang telah diperoleh untuk memenuhi pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian skripsi. Sistematika penulisan ini di klasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu Bab I didalam nya menguraikan beberapa bagian seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian. Bab II didalam nya membahas orientasi umum kebijakan orde baru, keadaan kondisi politik pada masa orde baru dan ciri-ciri utama kebijakan orde baru. Bab III didalam nya pengebirian parti politik, deidiologi politik Islam dan implikasi kebijakan pemerintah orde baru dalam pemberlakuan asa tunggal bagi politik Islam. Bab IV menguraikan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya. Pada bagian akhir, dilengkapi dengan daftar sumber dan lampiran-lampiran.

²⁰ Solihi Abdul Wahab, M.A, *Analisis Kebijakan*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2012) h 80



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG